

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2020

Anisa Fitria¹, Weriantoni², Bintang Rizky AMS³, Nur Ari Sufiawan⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi, Universitas Andalas, Payakumbuh, Indonesia
ansftria.af@gmail.com

Abstrak

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukanlah konsep yang baru di Indonesia. Penerapan desentralisasi fiskal harus diiringi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series sebanyak 5 tahun yaitu dari periode tahun 2016 sampai periode tahun 2020 dengan data cross section sebanyak 12 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Variabel desentralisasi fiskal, pajak daerah dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: PDRB, Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah, Jumlah Penduduk

Abstract

Regional autonomy and fiscal decentralization are not new concepts in Indonesia. The implementation of fiscal decentralization must be accompanied by the ability of local governments to manage finances. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on economic growth, analyze the effect of local taxes on economic growth and analyze the effect of population on economic growth. The type of data used in this research is secondary time series data for 5 years, from the 2016 period to the 2020 period with cross sectional data for 12 regencies in West Sumatra Province. The data analysis method used in this study is panel data regression using the fixed effect model. The results of this study indicate that the fiscal decentralization variable has a positive and insignificant effect on the economic growth of the districts in West Sumatra Province, the local tax variable has a positive and significant effect on the economic growth of the districts in West Sumatra Province, the population variable has a positive and significant effect on economic growth districts in West Sumatra Province. The variables of fiscal decentralization, regional taxes and population simultaneously have a significant effect on the regional economic growth of the districts in West Sumatra Province.

Keywords: GRDP, Fiscal Decentralization, Local Taxes, Total Population

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan merupakan konsep yang baru di Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan bentuk pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur keuangan pemerintah daerahnya secara mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah (Suharyanto, 2020). Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia resmi berjalan sejak tahun 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang perimbangan wewenang dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menggunakan prinsip “*Money Follows Functions*”, yaitu merupakan fungsi utama pelayanan publik didaerahkan dengan dukungan melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah sebagai bentuk pembiayaan pusat (Sidig, 2018).

Penerapan desentralisasi fiskal harus diiringi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal finansial. Melalui UU No. 33 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pendanaan pemerintah daerah melalui sumber penerimaan daerah yaitu meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Indikator yang dewasa ini digunakan dalam

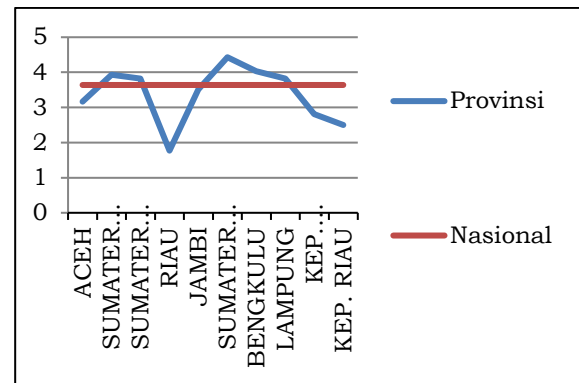
instrumen desentralisasi fiskal yaitu melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Peningkatan PAD dapat memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya daerah mendorong aktivitas ekonomi yang disertai dengan peningkatan kondisi makro dan sosial dari daerah.

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk kemandirian dalam mengelola daerahnya. Implikasi dari kebijakan ini adalah daerah diberikan kewenangan di segala bidang, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter serta keagamaan. Pemberian kewenangan tersebut diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah dengan asas *money follows function* (Sidig, 2018).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal diberikan kewenangan mengelola daerahnya secara mandiri. Seperti halnya di Indonesia, desentralisasi fiskal di provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Kebijakan desentralisasi fiskal di Sumatera Barat dapat dilihat dari total penerimaan antar berbagai tingkat pemerintahan melalui rasio PAD terhadap total penerimaan daerah yang meliputi PAD, dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil serta pendapatan lain-lain yang diterima daerah.

Desentralisasi fiskal melalui penerimaan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang terjadi secara terus menerus dengan peningkatan kapasitas produktif yang menghasilkan output yang besar bagi perekonomian dan pendapatan dalam periode yang panjang (Todaro & Smith, 2012). Pertumbuhan ekonomi terjadi jika pendapatan masyarakat bertambah sesuai dengan kegiatan ekonomi dalam satu periode tertentu. Dalam pandangan ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yaitu merupakan penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan penambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah (Pohan & Yuliana, 2021).

Indikator dalam menentukan kinerja pembangunan daerah dapat dilihat dari PDRB daerah tersebut (Sasana, 2009). Grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan PDRB Provinsi di Pulau Sumatera dengan laju pertumbuhan PDB secara nasional atas dasar harga konstan 2010.



Gambar 1. Perbandingan Laju PDRB Provinsi di Pulau Sumatera Barat dengan Laju PDRB Nasional Sumber: BPS, diolah

Pada grafik diatas digambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Sumatera berada pada posisi keempat sebesar 3,82 persen. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,43 persen, sedangkan laju pertumbuhan PDRB terendah yaitu di Provinsi Riau sebesar 1,77 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju PDRB nasional, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi diatas rata-rata laju PDRB nasional, dimana nilai laju PDRB nasional sebesar 3,64 persen. Hal ini menandakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat unggul. Namun, laju pertumbuhan ekonomi yang unggul ini belum tentu telah memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2020

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
2016	5,27
2017	5,30
2018	5,14
2019	5,01
2020	-1,62

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar

Jika dilihat lebih lanjut berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan 2010 di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Puncaknya yaitu pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis yang mencapai nilai negatif sebesar -1,62 persen. Laju pertumbuhan PDRB yang negatif ini menandakan adanya ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam periode tersebut.

Terdapat beberapa faktor untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan

teknologi. Faktor pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini adalah penduduk. Selain itu juga digunakan indikator penerimaan fiskal berupa pajak daerah.

Pajak merupakan indikator penting dalam kebijakan fiskal. Hal ini tidak hanya dikarenakan kontribusinya yang tinggi terhadap penerimaan APBN, tetapi juga menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam perekonomian. Pajak merupakan faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB). Angel & Aini (2022) menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah pemerintah harus meningkatkan produktivitas penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah yaitu dengan peningkatan pendapatan daerah dari pengoptimalan pajak daerah (Nidia, 2022). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Apriesta & Miyasto, 2013) mengemukakan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk yang cukup banyak dapat meningkatkan pasar potensial. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya jumlah penduduk dapat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi (Darma, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Rochaida (2016) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Rochaida menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan proses produksi sehingga akan menambah kemampuan produksi dan akhirnya meningkatkan perekonomian.

Hal ini sejalan dengan penelitian Safitri (2016) yang mengemukakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Khamdana (2016) mengemukakan bahwa penduduk atau pertumbuhan populasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk menyebabkan jumlah modal pekerja semakin menurun dan akhirnya berdampak kepada rendahnya output per pekerja. Yenny & Anwar (2020) juga mengemukakan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang meningkat namun tidak diiringi dengan produktivitas maka akan mengurangi pendapatan daerah, hal ini terjadi karena masyarakat hanya dapat melakukan konsumsi tanpa dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Sehingga yang terjadi ketika semakin besarnya jumlah penduduk namun tidak produktif akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Barat ternyata memberikan

dampak berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi namun belum optimal. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang masih mengalami fluktuasi. Menurut BPS pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 yaitu mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan PDRB yang mencapai nilai negatif yaitu sebesar -1,62%. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Arsyad Lincoln (2004) didefinisikan sebagai kenaikan PDB/Pendapatan Nasional Bruto (PNB) tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah terjadi atau tidaknya perubahan struktur ekonomi. Menurut Mankiw (2007) indikator pertumbuhan ekonomi yang umum digunakan adalah melalui PDRB, dimana PDRB merupakan kegiatan ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Adapun teori pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Teori Keynesian

John Maynard Keynes melalui bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* merekomendasikan bahwa perekonomian tidak diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Menurut Keynes peran pemerintah diperlukan dalam perekonomian dengan mengandalkan kebijakan fiskal pemerintah. Penerimaan pajak daerah yang selanjutnya dialokasikan sebagai pengeluaran pemerintah akan menaikkan tingkat pendapatan. Jika belanja pemerintah meningkat maka akan mendorong kenaikan pendapatan.

Teori Solow

Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa modal mengalami *diminishing returns*. Mankiw (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan tenaga kerja akibat pertumbuhan populasi akan memperlambat pertumbuhan output karena adanya *diminishing return* dan perekonomian mengarah ke tingkat kondisi mapan. Mengacu pada teori ini, suatu negara dengan tingkat populasi tinggi akan mempunyai akumulasi

modal per pekerja yang rendah sehingga tingkat pendapatan per pekerja juga rendah.

Desentralisasi Fiskal

Menurut Falleti (dalam Jumroh & Pratama, 2021) *decentralization is a process of state reform composed by a set of public policies that transfer responsibilities, resources, or authority from higher to lower of government in the context of a specific type of state*. Falleti menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan proses reformasi yang disusun melalui serangkaian kebijakan publik dalam bentuk pengalihan tanggung jawab, sumber daya, atau wewenang dari pemerintah yang lebih tinggi ke pemerintah yang lebih rendah. Sedangkan Desentralisasi fiskal menurut Sasana (2009) merupakan proses distribusi anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah dalam rangka mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan di bidang pemerintah.

Pajak Daerah

Menurut Dwi Anggoro, (2017) menjelaskan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerahnya. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional namun mengenai penerapan tarif disesuaikan dengan peraturan pemerintah daerah.

Pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat namun hasil dari penerimaan pajak diberikan, dibagikan atau dibebani pungutan pajak tambahan oleh pemerintah daerah.

Jumlah Penduduk

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia dalam jangka waktu selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan namun bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan hasil dari proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh lembaga pengumpul atau pihak lain (Abdullah, 2015). Sedangkan data panel adalah kombinasi dari data deret waktu (*time series*) dan silang tempat (*cross-section*). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data time series selama periode 2016-2020 pada 12 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan data cross-section.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data PDRB atas harga konstan tahun dasar 2010, data ringkasan APBD, data penerimaan pajak

daerah dan data jumlah penduduk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2020. Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PDRB, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal, pajak daerah dan jumlah penduduk. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Pengestimasi parameter model data panel digunakan tiga metode yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik, koefisien determinasi (R^2), uji F dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut ini merupakan hasil pengolahan data dalam penelitian ini, antara lain:

Uji Chow

Uji Chow berguna untuk mengetahui apakah model regresi data panel lebih baik menggunakan *fixed effect model* atau *common effect model*. Berdasarkan hasil regresi uji chow yang menunjukkan nilai $Prob > F$ adalah sebesar $0.0000 < 0.05$ maka model yang terpilih adalah *fixed effect*.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	46.453356	(11,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	150.844936	11	0.0000

Sumber: data olahan

Uji Hausman

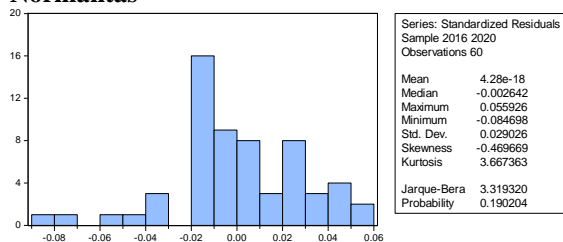
Uji hausman berguna untuk mengetahui apakah regresi data panel *fixed effect model* lebih baik digunakan dari pada regresi data panel *random effect model*. Berdasarkan hasil regresi uji hausman menunjukkan nilai $Prob > F$ adalah sebesar $0.0021 < 0.05$ maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect*.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.740183	3	0.0021

Sumber: data olahan

Uji Asumsi Klasik
Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber: data olahan

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera*. Pada gambar 2 dijelaskan bahwa nilai probabilitas sebesar $0.190204 > 0.05$ sehingga data berdistribusi normal.

Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	DF	LOGTAX	PENDUDUK
DF	1.000000	0.229419	0.125919
LOGTAX	0.229419	1.000000	0.827548
PENDUDUK	0.125919	0.827548	1.000000

Sumber: data olahan

Tabel 3 menjelaskan hasil uji *pairwise correlation* dimana dari hasil estimasi terlihat bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.008383	0.088314	-0.094920	0.9248
DF	-0.004239	0.002680	-1.582048	0.1206
LOGTAX	0.027001	0.016678	1.618990	0.1124
PENDUDUK				
K	-2.30E-08	2.90E-07	-0.079170	0.9372

Sumber: Data Olahan

Tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil uji *Glejser* dengan nilai probabilitas variabel desentralisasi fiskal sebesar $0.1206 > 0.05$; nilai probabilitas variabel pajak daerah sebesar $0.1124 > 0.05$; nilai probabilitas variabel jumlah penduduk sebesar $0.9372 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terkena masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin-Watson* (DW). Data tidak terkena masalah autokorelasi jika $Du < DW < 4-Du$. Berdasarkan hasil uji regresi didapatkan nilai *Durbin Watson* sebesar $1.6889 < 1.708078 < 2.3111$ maka data terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Regresi Data Panel Menggunakan Fixed Effect Model

Berdasarkan uji pemilihan model data panel melalui uji chow dan uji hausman dihasilkan bahwa model yang tepat adalah model regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil regresi data panel menggunakan *fixed effect model* dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel Menggunakan Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.89527	0.146268	101.8356	0.0000
DF	0.006604	0.004438	1.488049	0.1437
LOGTAX	0.172674	0.027622	6.251354	0.0000
PENDUDUK	1.35E-06	4.81E-07	2.813381	0.0072

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.996084	Mean dependent var	15.85228
Adjusted R-squared	0.994866	S.D. dependent var	0.463841
S.E. of regression	0.033236	Akaike info criterion	-3.758038
Sum squared resid	0.049709	Schwarz criterion	-3.234452
Log likelihood	127.7411	Hannan-Quinn criter.	-3.553234
F-statistic	817.5893	Durbin-Watson stat	1.708078
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Olahan

Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi pengaruh desentralisasi fiskal, pajak dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan indikator PDRB diperoleh nilai konstanta sebesar 14,89527 menunjukkan bahwa pada saat variabel bebas desentralisasi fiskal, pajak daerah dan jumlah penduduk konstan atau sama dengan nol maka pertumbuhan ekonomi yang diproksi melalui PDRB yaitu sebesar 14,89527 persen dengan asumsi *ceterisparibus*.

Nilai koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0.996084. Hal ini menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh variabel independen berupa desentralisasi fiskal, pajak dan jumlah penduduk sebesar 99.60 persen, sedangkan sisanya sebesar 0.40 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Dari hasil regresi desentralisasi fiskal, pajak dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui proksi PDRB Daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 diperoleh nilai F-statistik sebesar 817.5893 > F-tabel 4.07 dan probabilitas F sebesar 0.000000 < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel desentralisasi fiskal, pajak dan jumlah penduduk berpengaruh simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil regresi variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai t-hitung 1.488049 < 2.30600 dan nilai probabilitas 0.1437 > 0.05. Koefisien variabel desentralisasi fiskal yaitu sebesar 0.006604 yang berarti kenaikan rasio desentralisasi fiskal sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui PDRB sebesar 0.006794 persen dengan asumsi *ceterisparibus*. Desentralisasi fiskal ini menggambarkan rasio antara PAD dengan jumlah penerimaan daerah. Artinya, semakin besar rasio desentralisasi fiskal disuatu daerah maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori penelitian Prud'homme 1995 dan Oates 1972 (dalam Zulkipli, 2017) keduanya mengatakan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah khususnya penyediaan infrastruktur bagi masyarakat dapat lebih efisien karena pemerintah daerah lebih mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai t-hitung 6.251354 > 2.30600 dan nilai probabilitas 0.000 < 0.05. Koefisien variabel pajak daerah yaitu sebesar 0.172674 yang berarti kenaikan pajak daerah sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui PDRB sebesar 0.172674 persen dengan asumsi *ceterisparibus*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Angel & Aini, 2022) yang menjelaskan bahwa penerimaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai t-hitung 2.813381 > 2.30600 dan nilai probabilitas 0.0072 > 0.05. Koefisien variabel jumlah penduduk yaitu sebesar 1.35 yang berarti kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 jiwa akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui PDRB sebesar 1.35 persen dengan asumsi *ceterisparibus*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rochaida, 2016) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Rochaida menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan proses produksi sehingga akan menambah kemampuan produksi dan akhirnya meningkatkan perekonomian. Hal ini sejalan dengan penelitian Safitri (2016) yang mengemukakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020. Selanjutnya jika dilihat dari masing-masing pengaruh variabel independen, desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan maka dapat diberikan saran yaitu daerah sebaiknya dapat lebih

meningkatkan PAD daerahnya sehingga kontribusi terbesar pendapatan daerah tidak hanya dari dana perimbangan. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pengoptimalan pajak dan retribusi daerah, memberikan perhatian khusus terhadap badan usaha dan kekayaan milik daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Salah satu bentuk cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yaitu dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak dengan penyediaan informasi terkait pajak daerah di media sosial ataupun melalui aplikasi pajak, dimana wajib pajak dapat mengetahui secara jelas besaran pajak yang dibayarkan, kapan harus dibayarkan, batas waktu pembayarannya dan sanksi pajak. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap potensi para pelaku usaha yang usahanya dapat dijadikan objek pajak.

Pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan terkait kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dibidang pendidikan, kesehatan dan pemberian pelatihan kepada masyarakat dapat dilakukan sebagai bentuk investasi sumber daya manusia. Dengan adanya investasi dibidang sumber daya manusia ini mampu menjadikan masyarakat lebih produktif dalam kegiatan ekonomi yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Aswaja Pressindo*.
- Apriesta, L. F., & Miyasto. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/1916/1914>
- Arsyad, & Lincoln. (2004). *Ekonomi Pembangunan* (4th ed.).
- Darma, B. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2016-2020. *Citra Ekonomi*, 5(1), 90–100.
- Dwi Anggoro, D. (2017). *Pajak dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). Pajak Daerah dalam Konteks Ekonomi. In *Administrasi perpajakan daerah*. in MEDIA.
- Khamdana, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008 – 2012. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 23–38. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.59>
- Mankiw, & N. Gregory. (2007). *Makroekonomi* (keenam). Erlangga.
- Nidia, N. (2022). *Pengaruh Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten*. UIN SMH BANTEN.
- Pohan, A. A., & Yuliana, L. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2019. *Seminar Nasional Official Statistics, 2021*(1), 792–800. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.1044>
- Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan. *Forum Ekonomi*, 18(1), 14–24. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FOR_UMEKONOMI/article/download/42/40
- Safitri, I. (2016). Pengaruh Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 1(1), 56–65.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 419–438. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>
- Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 103. <https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.811>
- Sidig, D. S. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan antar Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 978–1001. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/244/157>
- Suharyanto, T. (2020). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Regional. *Jurnal Ilmiah*, 1–23.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development*. In *Pearson*. <http://eco.eco.basu.ac.ir/BasuContentFiles/57/57304a77-1269-4081-bd5b-4c66b84b06a4.pdf>
- Yenny, N. F., & Anwar, K. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(2), 19. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3181>

Zulkipli. (2017). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. III(1), 1–14.